
Implementasi Pembinaan Anggota Paskibraka Kota Palembang Tahun 2018

Implementation of the Development of Palembang City Paskibraka Members in 2018

Amir Paripurna¹⁾, Maulana^{1)*} & Yoyok Hendarso²⁾

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang,
Indonesia

2) Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Email: maulana.57@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pembinaan Anggota Paskibraka Kota Palembang Tahun 2018. Masalah difokuskan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan Paskibraka Kota Palembang. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari George Edward III. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi pembinaan Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 sudah cukup baik. Proses komunikasi, baik internal maupun dengan instansi terkait, berjalan sesuai harapan, meskipun masih perlu perbaikan dan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal ke depannya. Implementasi pembinaan Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, dan sebagian besar pelaksana kebijakan memahami dan mematuhi prosedur yang tertera dalam SOP tersebut. Selain itu, seluruh pegawai yang menjadi pelaksana kebijakan memiliki komitmen tinggi terhadap implementasi pembinaan Paskibraka Kota Palembang tahun 2018. Mereka bekerja dengan dedikasi dan tanggung jawab penuh demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Kata Kunci: Implementasi; Pembinaan; Paskibraka

Abstract

This article or writing aims to describe and analyze the implementation of Palembang City Paskibraka Member Development in 2018. The problem focuses on supporting and inhibiting factors in the implementation of Palembang City Paskibraka training. In order to approach this problem, a theoretical reference from George Edward III is used. Data was collected through interviews, observation and documentation and analyzed qualitatively. The research results show that communication in the implementation of Palembang City Paskibraka coaching in 2018 is quite good. The communication process, both internally and with related agencies, is running as expected, although it still needs improvement and evaluation to achieve more optimal performance previously. The implementation of Palembang City Paskibraka development in 2018 has followed clear standard operating procedures (SOP), and most policy implementers understand and comply with the procedures stated in the SOP. Apart from that, all employees who are policy implementers have a high commitment to the implementation of the 2018 Palembang City Paskibraka training. They work with dedication and full responsibility to achieve the desired goals and targets.

Keywords: Implementation; Coaching; Paskibraka

How to Cite: Paripurna, A, Maulana, & Hendarso, Y. (2024). Implementasi Pembinaan Anggota Paskibraka Kota Palembang Tahun 2018. *Journal of Law & Policy Review*. 2 (1): 106-113.



PENDAHULUAN

Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibraka) memiliki sejarah panjang dan mendalam yang terkait erat dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (Idris et al., 2022). Munculnya Paskibraka berawal dari deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (Kadir, 2014). Pada saat itu, dua pemuda dengan semangat nasionalisme yang tinggi mengibarkan bendera merah putih nasional, yang diketuai oleh Latief Hendradiningrat (Rahman, 2022). Bendera tersebut dijahit tangan oleh Fatmawati Soekarno dan dikenal sebagai "Bendera Pusaka" (Rizaldi et al., 2023). Sejak saat itu, pengibaran bendera merah putih menjadi simbol yang sangat penting dalam memperingati kemerdekaan Indonesia (Matondang et al., 2023; Yusriadi, 2018).

Sejak proklamasi kemerdekaan, para pemimpin bangsa Indonesia telah berupaya untuk membina dan mengembangkan generasi muda guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperjuangkan kehidupan bangsa (Wibowo et al., 2023). Dalam konteks ini, Paskibraka memiliki peran yang sangat strategis (Safarudin, 2021). Program pembinaan Paskibraka tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan keterampilan teknis dalam mengibarkan dan menurunkan bendera, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan, keadilan, serta memperdalam wawasan kebangsaan (Nugraha, 2022; Saragih et al., 2019).

Paskibraka tidak hanya sekadar sebuah kegiatan seremonial. Kegiatan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari persiapan, pendampingan, rekrutmen, seleksi, hingga pelatihan pengangkatan dan penurunan bendera pusaka (Simamora & Nababan, 2021). Setiap tahap ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota Paskibraka memiliki keterampilan dan disiplin yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik (Aritonang et al., 2022). Paskibraka juga melibatkan pemberian medali kepada anggota yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka (Puryanto, 2022, 2023).

Di Kota Palembang, pembinaan Paskibraka telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi. Beberapa masalah yang sering ditemui antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, proses pemilihan calon Paskibraka yang masih memerlukan perbaikan, dan kurangnya disiplin peserta dalam mengikuti proses pembinaan. Hal-hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan dari pembinaan Paskibraka itu sendiri.

Proses seleksi dan rekrutmen calon anggota Paskibraka dilakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional (Pinem, 2023; Puryanto, 2022). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih memiliki kualifikasi terbaik sehingga tugas mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka dapat dilaksanakan dengan benar, efisien, aman, dan efektif pada tanggal 17 Agustus (Idris et al., 2022; Safarudin, 2021). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembinaan Paskibraka di Kota Palembang adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung pelatihan yang efektif (Nugraha, 2022). Tanpa fasilitas yang memadai, sulit bagi para pelatih dan peserta untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, kondisi lapangan latihan yang kurang baik atau peralatan yang tidak memadai dapat menghambat proses latihan dan berpotensi menyebabkan cedera.

Selain itu, proses pemilihan calon Paskibraka juga masih memerlukan perbaikan. Proses seleksi yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar memenuhi syarat yang terpilih. Proses seleksi yang kurang transparan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan di kalangan peserta dan masyarakat (Saragih et al., 2019). Oleh karena itu, perlu adanya standar yang jelas dan mekanisme seleksi yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

Kurangnya disiplin peserta dalam mengikuti proses pembinaan juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Disiplin adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pembinaan Paskibraka (Darmanto, 2015). Tanpa disiplin, sulit bagi peserta untuk mengikuti semua tahapan



pembinaan dengan baik (Hamdani Ismail & Hamdani Harahap, 2018). Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih tegas dalam menegakkan disiplin di kalangan peserta. Pendekatan ini bisa berupa penegakan aturan yang lebih ketat atau pemberian sanksi bagi peserta yang melanggar aturan (Rahmadysah et al., 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembinaan anggota Paskibraka di Kota Palembang tahun 2018, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Data dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembinaan Paskibraka di masa depan, sehingga program ini dapat terus berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan holistik, memberikan pemahaman yang mendetail mengenai pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Subjek penelitian meliputi anggota Paskibraka, pelatih, dan pejabat terkait, dengan total 9 informan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang mencakup pengalaman langsung dalam pembinaan Paskibraka dan keterlibatan aktif dalam program tersebut. Kriteria ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam dari mereka yang benar-benar terlibat dan memahami proses pembinaan dengan baik. Kriteria tersebut meliputi anggota Paskibraka yang telah menjalani proses pelatihan, pelatih yang bertanggung jawab atas pembinaan, dan pejabat yang mengelola atau mengawasi program Paskibraka.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur, dilakukan tatap muka dan direkam. Setelah wawancara, rekaman ditranskripsikan secara verbatim untuk akurasi. Data transkrip kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik, yaitu mengkode data untuk mengidentifikasi tema dan pola utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini membantu menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pembinaan Paskibraka, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan beberapa teknik. Triangulasi data dengan berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi. Validasi member check dilakukan dengan membagikan hasil transkripsi kepada informan untuk akurasi. Selain itu, triangulasi peneliti melibatkan lebih dari satu peneliti untuk mengurangi bias. Metode ini membantu memahami pembinaan Paskibraka di Palembang serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Pembinaan Anggota Paskibraka di Kota Palembang tahun 2018

Dalam penelitian ini, analisis implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Teori ini menyebutkan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Sinaga et al., 2022; Wiyono et al., 2023). Setiap faktor ini memainkan peran krusial dalam menentukan seberapa efektif kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap masing-masing faktor ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pembinaan Paskibraka di Kota Palembang dilaksanakan dan tantangan apa yang dihadapi.

Komunikasi merupakan salah satu elemen fundamental dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018, komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat, baik internal maupun antar instansi, umumnya dinilai baik oleh para informan. Sebagian besar informan mengakui bahwa komunikasi yang terjalin selama pelaksanaan program berjalan lancar dan sesuai harapan. Informan mencatat bahwa tidak ada

masalah besar dalam proses komunikasi, yang mencakup penyampaian informasi, koordinasi, dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan.

Meskipun komunikasi berjalan dengan baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan evaluasi lebih lanjut. Proses komunikasi yang efektif memerlukan adanya umpan balik yang konstruktif dan penguatan hubungan antar instansi untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan proses pembinaan. Evaluasi berkala terhadap komunikasi yang berlangsung dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan meningkatkan kinerja di masa depan. Oleh karena itu, meskipun komunikasi saat ini sudah cukup baik, penting untuk terus memperbaiki mekanisme komunikasi guna mendukung pencapaian hasil yang optimal dalam pembinaan Paskibraka.

Sumber daya adalah aspek penting dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pembinaan anggota Paskibraka. Dalam penelitian ini, penulis menggali kondisi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pelaksana Tarmizi, S.Pd., MM, terungkap bahwa salah satu kendala utama adalah kondisi sarana dan prasarana yang ada. Tarmizi menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia sudah tidak memadai dan perlu ada penambahan serta perbaikan. Meskipun telah ada beberapa usulan untuk peningkatan sarana dan prasarana, belum ada tindak lanjut yang memadai, sehingga menghambat pencapaian hasil yang diinginkan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh staf pelaksana, Galuh Sugiantara, yang menyoroti pentingnya sarana dan prasarana dalam mencapai kinerja terbaik. Sugiantara menekankan bahwa kondisi fasilitas yang kurang memadai dapat berdampak negatif pada efektivitas pelatihan dan pembinaan. Sarana dan prasarana yang baik adalah kunci untuk mendukung kegiatan pembinaan Paskibraka, karena mereka menyediakan alat dan lingkungan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas secara efektif. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pembinaan di masa depan.

Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan pembinaan Paskibraka Kota Palembang tahun 2018, ditemukan bahwa standar operasional prosedur (SOP) telah ditetapkan dengan jelas, dan sebagian besar pelaksana kebijakan memahami prosedur tersebut. SOP yang jelas membantu pelaksana dalam menjalankan tugas mereka dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan harapan. Pengertian yang baik tentang SOP meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Komitmen dan dedikasi dari pelaksana kebijakan juga berperan penting dalam keberhasilan program. Komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan menjadi modal berharga untuk mencapai tujuan pembinaan Paskibraka. Pelaksana yang berkomitmen akan bekerja dengan lebih tekun dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya mendukung pencapaian hasil yang diinginkan. Sikap pelaksana yang positif dan pemahaman yang baik tentang prosedur yang berlaku merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi pembinaan.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam kasus pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018, meskipun struktur birokrasi yang ada relatif baik, pelaksanaan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur birokrasi yang baik dapat memfasilitasi proses implementasi kebijakan dengan mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak.

Namun, beberapa elemen yang menjadi penghambat masih perlu diperbaiki. Evaluasi berkala terhadap struktur birokrasi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang menghambat efektivitas implementasi. Dengan melakukan perbaikan pada elemen-elemen yang menjadi kendala, diharapkan pencapaian hasil dalam pembinaan anggota Paskibraka dapat meningkat di masa mendatang. Struktur birokrasi yang optimal akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan membantu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Analisis implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi masing-masing memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan. Komunikasi yang efektif dan aliran informasi yang baik antara pihak-pihak terkait sangat penting untuk mendukung pelaksanaan

program. Namun, meskipun komunikasi sudah berjalan dengan baik, masih ada ruang untuk perbaikan.

Sumber daya yang memadai, termasuk sarana dan prasarana, merupakan faktor kunci dalam mencapai hasil yang optimal. Kekurangan dalam fasilitas dapat menghambat efektivitas pelatihan dan pembinaan, sehingga perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas. Sikap pelaksana yang positif dan pemahaman yang baik tentang SOP mendukung pelaksanaan kebijakan dengan lebih efektif. Komitmen tinggi dari pelaksana kebijakan juga merupakan modal berharga dalam mencapai tujuan program.

Struktur birokrasi yang baik dapat memfasilitasi implementasi kebijakan, tetapi masih ada elemen yang perlu diperbaiki. Evaluasi berkala dan perbaikan pada struktur birokrasi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam implementasi pembinaan Paskibraka, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Dengan memperbaiki komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, diharapkan pembinaan Paskibraka di Kota Palembang dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih efektif di masa mendatang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang Tahun 2018

Implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam analisis ini, kita akan mengidentifikasi dan membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pembinaan Paskibraka di Kota Palembang. Dengan memahami kedua faktor ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelaksanaan program di masa depan.

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 adalah komunikasi yang terjalin dengan baik, baik dalam internal maupun dengan instansi terkait. Komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Proses komunikasi yang lancar melibatkan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi dan sosialisasi, yang memungkinkan semua pihak untuk berkolaborasi dan berbagi informasi dengan jelas.

Rapat koordinasi yang rutin diadakan berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Sosialisasi yang dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan membantu menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, prosedur, dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi yang baik juga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta memfasilitasi penyelesaian masalah secara efektif.

Selain itu, adanya Standar Operating Procedure (SOP) yang jelas juga merupakan faktor pendukung signifikan dalam implementasi pembinaan anggota Paskibraka. SOP memberikan pedoman yang terperinci tentang bagaimana setiap aspek pembinaan harus dilaksanakan, termasuk prosedur, tanggung jawab, dan standar yang harus dipenuhi. Dengan adanya SOP yang jelas, para pelaksana kebijakan dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

SOP yang baik juga membantu dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan pembinaan. Ketika semua pihak mengikuti pedoman yang sama, hasil yang dicapai akan lebih terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, SOP tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa tujuan pembinaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Namun, dalam implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018, terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat pencapaian hasil yang optimal. Salah satu faktor utama adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung yang belum sesuai dengan



kebutuhan. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara efektif. Dalam kasus ini, kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat proses pembinaan dan mempengaruhi kualitas hasil yang dicapai.

Ketika fasilitas yang tersedia tidak cukup atau tidak dalam kondisi baik, pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan tidak optimal. Misalnya, kekurangan peralatan atau fasilitas pelatihan dapat menghambat pelaksanaan latihan atau aktivitas yang diperlukan untuk pengembangan anggota Paskibraka. Selain itu, kekurangan fasilitas juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan atau kesulitan bagi para peserta dan pelaksana, yang pada gilirannya dapat memengaruhi motivasi dan kinerja mereka.

Faktor penghambat lainnya adalah konsep pelaksanaan kegiatan yang belum tersusun dengan baik. Sebuah program yang sukses memerlukan perencanaan yang matang dan detail. Konsep pelaksanaan yang tidak terstruktur dengan baik dapat menyebabkan kebingungan, ketidakefektifan, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Perencanaan yang kurang baik dapat mempengaruhi semua aspek pelaksanaan, mulai dari penjadwalan kegiatan hingga alokasi sumber daya dan pengelolaan waktu.

Ketidaktertusan dalam konsep pelaksanaan juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan. Tanpa rencana yang jelas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan menjadi sulit, sehingga menghambat upaya perbaikan dan penyempurnaan program. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa konsep pelaksanaan kegiatan disusun dengan baik, mencakup semua aspek yang diperlukan, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018, faktor pendukung seperti komunikasi yang baik dan adanya SOP yang jelas berperan penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Komunikasi yang lancar memungkinkan koordinasi yang baik antara semua pihak, sementara SOP menyediakan pedoman yang terperinci untuk memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaan.

Namun, terdapat juga faktor penghambat yang perlu diatasi, yaitu jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai serta konsep pelaksanaan kegiatan yang belum tersusun dengan baik. Kekurangan sarana dan prasarana membatasi efektivitas pelaksanaan, sementara konsep pelaksanaan yang tidak terstruktur dengan baik dapat menghambat koordinasi dan pengelolaan kegiatan.

Untuk meningkatkan implementasi pembinaan Paskibraka di masa depan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kedua faktor ini. Memperbaiki kondisi sarana dan prasarana serta menyusun konsep pelaksanaan yang lebih terperinci dan terencana akan membantu mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan kualitas pembinaan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih efektif di masa mendatang.

SIMPULAN

Analisis implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang mendukung merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Komunikasi yang efektif dan aliran informasi yang lancar mendukung pelaksanaan program, meskipun masih perlu perbaikan. Sumber daya, terutama sarana dan prasarana, harus ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal. Sikap pelaksana yang memahami SOP dan berkomitmen tinggi turut mendukung pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik memfasilitasi implementasi, namun beberapa elemen masih memerlukan perbaikan. Untuk hasil yang lebih baik, perlu evaluasi dan perbaikan dalam semua aspek ini di masa depan.

Implementasi pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang signifikan. Faktor pendukung utama adalah komunikasi yang efektif dan adanya Standar Operating Procedure (SOP) yang jelas. Komunikasi yang baik memastikan koordinasi dan kolaborasi yang lancar, sedangkan SOP memberikan pedoman yang



konsisten dan terperinci, membantu menjaga kualitas pelaksanaan. Namun, penghambat utama adalah kekurangan sarana dan prasarana yang memadai serta konsep pelaksanaan yang belum terstruktur dengan baik. Kekurangan fasilitas membatasi efektivitas kegiatan, sedangkan perencanaan yang tidak matang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan. Untuk meningkatkan hasil di masa depan, penting untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana serta menyusun rencana pelaksanaan yang lebih terperinci dan terencana. Langkah-langkah ini akan membantu mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pembinaan anggota Paskibraka Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, M. G., Lubis, M. R., & Ideyani, N. (2022). Hubungan Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Keterkaitan Pegawai dengan Kepuasan Kerja. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2015–2022. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.992>
- Darmanto. (2015). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 1–30.
- Hamdani Ismail, W., & Hamdani Harahap, R. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS di Lingkungan Kementerian Agama Implementation of Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 45 of 2015 on Discipline of Civil Servant Attendance in the. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 124–146. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Idris, A. M., Thamrin, S., Yoegiantoro, D., & Triprasetyo, R. A. (2022). Kontribusi Pembela Tanah Air (PETA) dalam Pembentukan TNI dengan Pendekatan Historis dan Ilmu Pertahanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 584–593. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1256>
- Kadir, A. (2014). Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 85–107. https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_P-mXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pacara+keling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem
- Matondang, A. H., Hartono, B., & Harahap, D. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2391–2403. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1636>
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304–313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Pinem, S. (2023). Alternative Criminal Punishments for Completion of Misdemeanor Crimes with Social Justice. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2525–2537. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1672>
- Puryanto, S. (2022). Konflik, Karakter dan Pancasila: Studi Kepustakaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2351–2360. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1076>
- Puryanto, S. (2023). Conflict Resolution in the Interactionism Symbolic Perspective. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2597–2602. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1747>
- Rahmadysah, A., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1565–1575. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1429>
- Rahman, F. (2022). Analisis Prediksi Finansial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Springate Sebelum dan Selama Covid- 19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1000>
- Rizaldi, B. A., Sianipar, J. F., & Anwar, S. (2023). Peran Operasi Militer Dalam Mendukung Upaya Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2848–2858. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1749>
- Safarudin, S. (2021). Mistifikasi Prabowo-Sandi dalam Iklan Politik. *Perspektif*, 10(1), 255–264. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4682>

- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).
- Simamora, A. P., & Nababan, R. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK : Suatu Kajian Doktrinal (The Legal Basis and Impact of the KPK ' s National Insight Test : A Doctrinal Study). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September 2020), 201–208. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.740>
- Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *Perspektif*, 11(3), 1209–1218. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6429>
- Wibowo, D. E., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3075–3088. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1744>
- Wiyono, B., Fachruddin, I., Abror, D., Pramono, T., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Dan Angka Kreditnya Pada Satpol PP Dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 69–76. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1503>
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>

